

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan kondisi alam negara kita yang sangat subur, dengan hamparan lahan yang sangat luas, serta keanekaragaman hayati yang melimpah dan letak negara yang beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang tahun, sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Tidak hanya dikenal sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai produsen rokok dan pertanian tembakau terbaik di dunia. Yang mana Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar bagi industri rokok baik lokal maupun internasional. Dari sepuluh negara penghasil tembakau dunia, empat negara memproduksi hampir 2/3 (lebih dari 4 juta ton) suplai tembakau dunia yang berjumlah sekitar 6,3 juta ton. Keempat negara tersebut adalah : Cina (38%), Brasilia (10,3%), India(9,1%) dan Amerika (6,3%). Kontribusi Indonesia sekitar 15.000 ton daun tembakau atau 2,3% suplai dunia. Sementara perusahaan tembakau di Indonesia sebanyak 98% adalah termasuk perkebunan rakyat, dan 2% adalah perkebunan besar nasional¹. Menurut jenisnya, tembakau

¹ Departemen pertanian direktorat jenderal perkebunan, *Statistik perkebunan Indonesia 2000-2002 : kelapa sawit (oil palm)*, (Jakarta: Sekretariat direktorat jenderal perkebunan, 2000).

Indonesia dianggap menjadi salah satu negara penghasil rokok terbaik. Yang mana negeri ini dikenal dengan penghasil tembakau dan cengkeh kualitas terbaik. Dari pengolahan dan racikan tembakau dan cengkeh inilah yang melahirkan ‘rokok cengkeh’ lebih dikenal dengan sebutan *kretek*. Identitas ini pulalah yang meletakkan kretek dengan Indonesia, sebagaimana halnya cerutu dengan Kuba, atau sepakbola dengan Inggris atau Brazilia. Karena, kretek tidak di buat di AS atau Eropa.

Tanaman tembakau merupakan potensi ekonomi pedesaan dan menempati posisi penting strategis dalam pembangunan nasional. Selain itu petani tembakau merupakan sumberdaya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu keberadaanya harus memperoleh perhatian yang cukup agar mereka dapat berkembang.

Namun sangat disayangkan perkembangan industri tembakau tidak berjalan mulus, di satu sisi tembakau dianggap sebagai tanaman emas hijau oleh para petani tembakau karna harga jualnya yang tinggi serta sebagai sumber kesejahteraan bagi para pelaku industri rokok yang mana dari tanaman ini menghasilkan tenaga kerja yang begitu besar, serta memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian negara, tetapi di sisi lain permasalahan tembakau yang tidak jauh dari permasalahan rokok akibat pengaruh dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat seperti kanker, serangan jantung, hipertensi, serta gangguan janin telah membuat angka kematian tertinggi yang diakibatkan karena pengaruh merokok masyarakat.

Permasalahan kesehatan masyarakat akibat perilaku merokok sudah menjadi permasalahan penting dan besar di dunia. *World Health Organization* (WHO) sebagai badan kesehatan dunia pada tanggal 21 Mei 2003 membuat perjanjian internasional yaitu *World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC). Dimana perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian supranasional yang bertujuan melindungi generasi saat ini dan yang akan datang, dari efek konsumsi tembakau kepada kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi. Yang mana isi perjanjian ini untuk membatasi pengguna rokok, serta isi perjanjian ini mengikat pengaturan produksi, penjualan, distribusi, periklanan, dan perpajakan tembakau. Perjanjian ini mulai berlaku pada 27 Februari 2005 dan telah ditanda tangani oleh 168 Negara dan secara legal mengikat 177 Negara yang meratifikasi dan yang mendatangi *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Terdapat 19 negara anggota PBB yang tidak meratifikasi perjanjian internasional, di mana 10 negara tidak mendatangi dan 9 telah mendatangi namun tidak meratifikasi². Indonesia sebagai negara anggota PBB juga ikut dalam menyepakati perjanjian FCTC ini namun hanya Indonesia negara di Asia Pasifik yang belum mendatangi dan meratifikasi perjanjian ini. Hal ini mungkin dilakukan dan masih menjadi pertimbangan karena sektor industri

² Wikipedia, *konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau WHO*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/konvensi_kerangka_kerja_pengendalian_tembakau_WHO di akses tanggal 4 Agustus 2016, pukul, 00.35 wib.

rokok sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan negara melalui cukai rokok.

Permasalahan rokok di Indonesia sudah dianggap serius melihat angka kematian di Indonesia begitu tinggi dan hampir 34,7% penduduk di Indonesia berusia 10 tahun ke atas adalah perokok.³ Pemerintah telah membuat dan mengesahkan peraturan mengenai pengendalian tembakau yaitu PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Peraturan ini berisi mengenai pencegahan dari bahaya merokok di mana memuat peraturan tempat merokok, pengamanan kepada ibu hamil dan anak – anak, sampai peraturan mengenai jumlah produksi rokok, periklanan rokok yaitu di media massa sampai sponsorship di *event - event* sekolah dan lainnya.

³ Kementrian kesehatan RI, *riset kesehatan* dasar, jakarta: Badan penelitian dan pengembangan kesehatan, 2010).

Pemberlakuan PP no 109 tahun 2012 telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, pengesahan PP no 109 tahun 2012 ini dinilai telah merugikan sektor industri rokok karena dalam PP ini akan menambah biaya produksi rokok serta mempersempit ruang gerak pemasaran serta tekanan perdagangan yang semakin meningkat, yakni dengan pembatasan iklan dan sponsor terkait dengan rokok, sehingga membuat sejumlah perusahaan iklan dan berbagai media bakal kehilangan pendapatan mereka. Pemerintah daerah juga akan ikut terkena dampak berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari reklame produk tembakau.

Pengaruh kebijakan PP no 109 tahun 2012 ini mengenai pengaruhnya terhadap industri rokok serta Keyakinan yang berkembang dewasa ini adalah industri rokok memberi sumber kehidupan bagi banyak orang, salah satunya adalah para petani tembakau. Maju mundurnya ekonomi dan kesejahteraan petani tembakau bergantung kepada industri rokok.

Karna alasan ini lah penulis akan meneliti tentang pengaruh yang di timbulkan dari dampak kebijakan PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap kesehatan masyarakat ini dengan kehidupan ekonomi dan sosial petani tembakau di desa Selopamiro, Imogiri.

B. Rumusan masalah

Bagaimanakah dampak yang di timbulkan dari kebijakan PP no 109 tahun 2012 terhadap ekonomi dan sosial petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri, Bantul ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, yang di timbulkan dari kebijakan di berlakukanya PP no 109 tahun 2012 tentang pengendalian tembakau.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan dapat menjadi bahan bacaan, refrensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pemerintahan serta menjadi kajian ilmu pemerintahan khususnya mengenai dampak peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap ekonomi dan sosial petani tembakau khususnya di desa Selopamioro, Imogiri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah terhadap kebijakan mengenai dampak pengendalian tembakau bagi para petani tembakau dan Menjadi bahan bacaan bagi siapapun yang tertarik pada persoalan kebijakan pengendalian tembakau yang berdampak pada kehidupan para petani khususnya pada petani tembakau.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Ealau dan Kenneth prewitt⁴ yang dikutip Charles O.Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mantaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).

⁴ Suharno, *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK :kajian proses dan analisis kebijakan*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), hlm 3.

Richard Rose⁵ sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kemudian definisi lain di sampaikan oleh Carl Friedrich⁶, menurutnya kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

⁵ Budi winarno, "Apakah Kebijakan Publik ?" *Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2002), hlm 15-16

⁶ Ibid, hlm 16.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Chandler dan Plano⁷, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Pendapat lain dikemukakan Chief J.O Udoji dalam Sholichin Abdul Wahab. Udoji⁸ mendefinisikan kebijakan publik “an

⁷ Drs. Hessel Nogi S, dan Tangkilisan, MSi, “*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*” dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, (Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003), hlm 1.

⁸ Suharno, *op.cit.*, hlm 11

sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Amir santosa⁹ dengan mengkomparasikan berbagai definisi yang di kemukakan oleh para ahli mengumpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori.

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santosa berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori atau kelompok ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat kaibat yang dapat diramalkan. Para ahli ini melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, kebijakan

⁹ Suharno, *op, cit*, hlm 12-14

publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan mengikuti pandangan Anderson, kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/swasta tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan definisi diatas dapat dirumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan. Kata 'publik' dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara sistem politik serta administrasi. Sementara 'pemerintah' adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi,

negara hingga supra negara (ASEAN,EU) dan dunia (WTO,PBB).¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang di lakukan dalam proses kegiatan bersifat politis. Aktifitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam megkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa

¹⁰ Suharno,*op.cit.*,hlm. 4-5

ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn sebagaimana di kutip Suharno¹¹ adalah sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:

- Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara

¹¹ Suharno, *op.cit.*, hlm, 24-25

mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2) Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini analisis perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternative-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan dipilih.

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan .

4) Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. dalam

proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil

Gambar 1. Tahap-tahap kebijakan

Tahap tahap kebijakan:

Penyusunan Kebijakan



Formulasi kebijakan



Adopsi kebijakan



Implimentasi kebijakan



Evaluasi kebijaka

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Suharno, proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayakngkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga di tuntutan memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*)¹².

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat keputusan/kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun memang ada pendekatan dalam pembuatan keputusan yang disebut dengan

¹² Suharno, *Dasar-dasar kebijakan kajian Proses dan Analisi Kebijakan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 40-42.

“rasional” semata. Tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat di pisahkan dari dunia nyata. Sehingga dengan demikian adanya tekanan dari luar tersebut ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)

Kebiasaan lama organisasi yang oleh Nigro disebutkan dengan istilah “*sunk cost*” seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti oleh kebiasaan itu oleh para administrator meskipun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut dikritik karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus diikuti terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat pribadi

Berbagai keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan banyak yang dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Proses penerimaan dan pengangkatan pegawai dapat diambil contoh sebagai kasus yang seringkali diwarnai dan dipengaruhi

oleh sifat-sifat pribadinya. Dengan kata lain seringkali faktor-faktor dan sifat pribadi para pembuat keputusan berperan besar sekali.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

d. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno¹³ Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai, apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan.

¹³Suharno, *op.cit*, hlm 21

Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

- 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, infrastruktur lainnya.
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu

kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

e. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno¹⁴ ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan implimentasi dan pemaksaan pemberlakuan.

¹⁴ Suharno, *op.cit.*, hlm. 14-15.

- 3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

f. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno¹⁵ menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan substansif versus kebijakan procedural

- Kebijakan substansif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.
- Kebijakan distributive versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive. Kebijakan distributif

¹⁵ Suharno, *op.cit.*, hlm 15-16.

menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributive merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemikiran atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

2) Kebijakan material versus kebijakan simbolik

- Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran.
- Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

3) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*privat goods*)

- Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan

yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2. Analisis Dampak Kebijakan

a. Pengertian Analisis Dampak Kebijakan

Menurut Komarudin analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.¹⁶

Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto¹⁷, analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri,serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sebuah kebijakan, mau tidak mau pasti menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, dampak positif di maksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif

¹⁶ T Nurhayati dalam BAB II tinjauan pustaka, di akses dari Repository.widyatama.ac.id, pada tanggal 14 januari 2016 pukul 11.30 wib

¹⁷ Aries Kurniawan, *13 pengertian analisis menurut para ahli di dunia*, di akses dari <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, pada tanggal 13 januari 2016 pukul 13.36 wib

dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Menurut Anderson¹⁸, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. *Output* kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan *outcome* kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik pengetahuan.

Menurut sebagian pakar Dye & Anderson terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni : Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya masyarakat miskin (berdasarkan kriteria tertentu), para pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarginalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang

¹⁸ James E. Anderson, *public policy making*, (New Yoerk: Holt, Rinerhart and Winston, 1984), cet. Ke-3. hlm 3-5.

dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.¹⁹

Untuk menemukan dampak dari sebuah kebijakan di perlukan evaluasi kebijakan untuk menganalisis dampak kebijakan yaitu dengan melakukan pendekatan evaluasi. Menurut Patton dan Sanwicky dalam Diah Mutiarin²⁰ mengklarifikasi metode pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) bentuk pendekatan evaluasi dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya yaitu:

- 1) *Before and after comparations*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya satu kebijakan atau program diimplementasikan.
- 2) *With and without comparisions*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan pembanding kondisi

¹⁹Definisi kebijakan publik, <http://erfansetiawan.blogspot.co.id/2011/10/analisis-dampak-kebijakan-publik.html> di akses pada tanggal 13 january 2016|21.13 wib.

²⁰ Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin, *Manajemen birokrasi dan kebijakan: penelusuran konsep dan teori*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2014), Hlm 8.

anantara yang tidak mendapatkan dan yang mendapatkan kebijakan atau program, yang telah dimodifikasi dengan memasukkan perbandingan kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.

- 3) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketepatan perencanaan yang ada (*planned*).
- 4) *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/pengendalian untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
 - *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
 - *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang di ambil oleh se-seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak itu dampak positif maupun negatif.

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang / benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi²¹.

Soemarwoto menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Selanjutnya soemarwoto menjelaskan :”aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kata sosial berasal dari kata “socius” yang artinya kawan atau teman. Dalam hal ini arti teman bukan terbatas sebagai teman

²¹ KBBI Online, di akses dari <http://kbbi.web.id/dampak>, pada tanggal 17 januari, pukul 16:24.

sepermainan, teman kerja, teman kuliah, teman sekampung dan sebagainya. Dalam hal ini teman adalah mereka (orang-orang) yang ada di sekitar kita, yakni yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu kata sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologis, manusia sering disebut makhluk sosial yang artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa ada orang lain di sekitarnya.

Istilah ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Oikos" yang artinya rumah tangga dan "Nomos" artinya mengatur. Jadi secara harafiah, ekonomi berarti cara mengatur rumah tangga. Ini adalah pengertian yang paling sederhana. Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian ekonomi menjadi lebih luas. Ekonomi dalam sosiologi dapat diartikan sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ekonomi - Sosial mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sementara itu ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang berhubungan dengan asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan. Sekilas Sosial dan Ekonomi seperti dua hal dan cabang ilmu yang berbeda, namun diantara keduanya sebenarnya terdapat kaitan yang erat. Salah satu

kaitan yang erat tersebut adalah, Jika keperluan ekonomi tidak terpenuhi maka akan terdapat dampak sosial yang terjadi di masyarakat kita. sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.

Sosial ekonomi selalu berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana manusia –manusia itu hidup, karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dengan segala perkembangan materi dan sejumlah permasalahan hidup. Penduduk dan kepadatan penduduk, konsumsi dan produksi pangan, perumahan, sandang kesehatan, dan penyakit, faktor-faktor ini berkembang tidak menentu dan sangat mempengaruhi kondisi kondisi dimana manusia itu harus hidup.

Dampak sosial yang terjadi di masyarakat akibat tidak terpenuhinya faktor ekonomi yang banyak terjadi di sekitar kita. Berikut beberapa contoh dampaknya

a. Kesenjangan sosial

Sejatinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara maka bisa juga ikut mendongkrak status dan pendapatan seluruh lapisan masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak dilakukan kajian menyeluruh akan manfaat dan keuntungan yang di dapatkan dari pertumbuhan ekonomi negara. Yang terjadi

adalah semakin tingginya jurang kesenjangan sosial di masyarakat akibat yang merasakan kemakmuran dari pertumbuhan ekonomi hanya kalangan lapisan masyarakat menengah ke atas sementara kalangan masyarakat menengah ke bawah masih bergelut dengan kekurangan dan tidak bisa ikut merasakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara

b. Kekerasan etnis dan kelompok

Contoh kasus dampak sosial ekonomi ini sering terjadi di Indonesia, timpangnya perekonomian mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, merasakan kemakmuran dan pemerataan pembangunan. Akhirnya masyarakat yang berada dalam lingkup seperti ini jadi gampang terpengaruh dan tersulut, tidak memiliki pendirina sendiri dan cenderung gampang sekali terprovokasi baik oleh masa ataupun oleh tokoh yang mereka anggap lebih pintar. Inilah yang menyebabkan suatu daerah rawan sekali dengan konflik tidak memikirkan lebih dalam akibat jangka panjang dari konflik tersebut.

4. Definisi Konseptual

Yang di maksud dengan definisi konseptual adalah suatu pengertian dari gejala yang menjadi pengertian pokok penelitian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk

menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam kelompok permasalahan

- a. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu
- b. Analisis dampak Kebijakan merupakan penguraian dari suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang di telaah dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut berdampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat baik bermanfaat maupun merugikan.
- c. Dampak ekonomi dan sosial mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang berhubungan dengan asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan. Sementara sosial merupakan hubungan ketergantungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sekilas sosial dan ekonomi seperti dua hal dan cabang ilmu yang berbeda, namun diantara keduanya sebenarnya terdapat

kaitan yang erat. Salah satu kaitan yang erat tersebut adalah, Jika keperluan ekonomi tidak terpenuhi maka akan terdapat dampak sosial yang terjadi di masyarakat kita. sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.

5. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah langkah yang harus ditempuh untuk menjabarkan bagaimana melihat atau mengukur suatu konsep. Dengan kata lain definisi operasional adalah sebagai petunjuk menterjemahkan suatu konsep menjadi lebih nyata dan terperinci sehingga mudah dipahami.

Untuk memudahkan penelitian maka penulis menggunakan definisi operasionalnya menggunakan pendekatan :

- a. Analisis dampak kebijakan, yang mana peneliti akan menganalisis kebijakan dari PP no 109 tahun 2012 terhadap dampak positif dan negatifnya kepada masyarakat serta menghubungkan pengaruhnya terhadap industri rokok serta petani tembakau khususnya di desa Selopamioro, Imogiri.
- b. Dampak ekonomi dan sosial yang di timbulkan dari PP no 109 tahun 2012 terhadap para petani tembakau desa Selopamioro,

Imogiri. Dari pendapatan penghasilan dan biaya usaha pertanian yang di keluarkan dalam lima tahun belakangan, serta pola tingkah laku sosial kehidupan para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang akan di gunakan pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati²²

Serta menggunakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable dalam hal ini PP yang di keluarkan pemerintah dengan hak ekonomi dan sosial petani tembakau itu sendiri

2. Desain penelitian

Dengan di gunakan metode penelitian ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap, yaitu :

²² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, : remaja rodakarya,2002) hlm .9

a. Perencanaan

Kegiatan yang akan di lakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan penyusunan instrument penelitian.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai *human instrument* mencari informasi data, yaitu wawancara mendalam kepada para petani tembakau di desa Selopamioro khususnya kelompok tani di daerah tersebut. Selain itu peneliti juga menganalisis kebutuhan peralatan praktikum dan observasi bagaimana kehidupan para tani setelah kebijakan PP 109 tahun 2012 di tetapkan.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah penliti melakukan wawancara mendalam terhadap para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri serta observasi mengamati kehidupan para petani tembakau setelah kebijakan PP 109 tahun 2012 tersebut di tetapkan.

d. Evaluasi

Semua data kehidupan ekonomi dan sosial para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri dari dampak kebijakan PP

109 tahun 2012 yang telah di analisis kemudian di evaluasi sehingga di ketahui perbandingan dampak dari kebijakan PP 109 tahun 2012 terhadap kehidupan ekonomi dan sosial petani tembakau di Imogiri.

3. Tempat dan Waktu penelitian

Dalam penelitian kualitatif istilah yang di gunakan adalah *setting* atau tempat penelitian. yaitu tempat penelitian yang akan di lakukan di desa Selopamioro kecamatan Imogiri, Bantul. Sedangkan untuk waktu penelitiannya yaitu pada bulan Mei dan Juni 2016.

4. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data di peroleh.²³ Adapun yang di jadikan sumber data adalah :

- a. Refrensi dari buku, jurnal dan internet terkait kebijakan mengenai pengendalian tembakau.
- b. Wawancara terhadap para petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri, yaitu : Bapak Kasi, Kasman, Keman, Sarwono, Siswodiarjo, Sugiyo, Sumartinto, Suroyo, dan Tirto wardoyo serta wawancar dengan Ibu Ir Ishartati, MMA selaku Kasi perkebunan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul.

²³ Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

5. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada perbandingan kehidupan para petani tembakau di Imogiri dari segi ekonomi dan sosial sebelum dan sesudah kebijakan PP no 109 tahun 2012 di tetapkan. Sedangkan ruang lingkup yang diteliti meliputi analisis kebijakan PP no 109 tahun 2012 sehingga berdampak pada kehidupan petani tembakau di desa Selopamioro, Imogiri.

6. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Cara memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada responden melalui percakapan langsung yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan tepat dari wawancara dengan responden (petani tembakau), serta melakukan observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1) Teknik wawancara (*interviewe*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kehidupan ekonomi dan sosial petani tembakau dari penetapan PP no 109 tahun 2012.

2) Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala – gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁵ Teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kehidupan ekonomi dan sosial petani tembakau dari penetapan PP no 109 tahun 2012.

3) Teknik dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.²⁶ Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengendalian tembakau dan petani tembakau.

b. Data sekunder

²⁴ Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif edisi revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 186.

²⁵ P. Joko Subagyo, “*metode penelitian dala teori praktek*”, (Jakarta :Rineka Cipta, 1997), hlm. 63.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2009),cet. IX, hlm. 329.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan di sajikan antara lain dalam bentuk tabel atau diagram atau segala informasi yang berasal dari literature yang ada hubungannya dengan teori- teori mengenai topik penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁷

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang di berikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :²⁸

a. Reduksi Data

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008),cet. IV, hlm. 244.

²⁸ Ibid, hlm 246-252.

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang di anggap penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti –bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.